











baginya sesuai dengan masa *iddah*. Sementara pada ayat (2) masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya adalah menurut kepatutan. Masa berkabung ini berkaitan dengan masa *iddah* yang dilakukan oleh istri, sehingga hal ini juga berpengaruh dengan kebolehan untuk menikah lagi. Sementara masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak disebutkan secara jelas berapa waktu yang harus ditempuh. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.

Di masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya cenderung untuk menutup hati untuk menikah lagi. Namun, ada beberapa yang dengan alasan tertentu memilih untuk mencari pendamping lain. Karena dalam aturan yang berlaku baik aturan Islam maupun aturan positif tidak memberikan kepastian yang jelas tentang berapa masa berkabung untuk suami, maka ada yang menikah lagi setelah 40 hari kematian istrinya atau setelah 100 hari kematian istrinya. Keberagaman tersebut membuat ketidakjelasan sebenarnya seberapa batas minimal seorang suami harus berkabung setelah kematian istrinya.

Dengan alasan tersebut kami tertarik untuk melakukan penelitian tentang tolak ukur batas kepatutan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya sesuai dengan yang tertera pada pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal masa kepatutan setiap daerah pasti mempunyai batas kepatutan yang berbeda-beda, oleh karena itu kami ingin mengambil objek penelitian di



























